

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, keberhasilan Pemko Padang Panjang dalam merelokasi PKL tidak terlepas dari pendekatan yang cermat dan berorientasi pada kepentingan bersama. Pemerintah mampu menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan fungsional, salah satunya melalui pemindahan aktivitas perdagangan ke Pasar Kuliner yang dibangun di kawasan Terminal Lapangan Kantin. Sebelum relokasi, kawasan kota dipenuhi aktivitas PKL yang menempati trotoar, badan jalan, dan ruang terbuka lainnya, yang menyebabkan terganggunya fungsi ruang publik serta keluhan dari masyarakat. Relokasi ini mengubah wajah kota menjadi lebih tertata dan meningkatkan kenyamanan warga dalam mengakses ruang publik.

Kedua, upaya penataan ruang publik dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan lokasi baru yang strategis, pembangunan infrastruktur dan fasilitas berdagang yang representatif, hingga pendekatan komunikasi yang intensif kepada para pedagang. Pemerintah tidak menggunakan pendekatan koersif atau pemaksaan, melainkan mendorong dialog, musyawarah, dan pelibatan pedagang dalam proses kebijakan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi fondasi utama. Selain itu, sinergi antara dinas terkait, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat juga menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan program ini.

Ketiga, persetujuan para pedagang terhadap kebijakan relokasi didasarkan pada sejumlah pertimbangan rasional dan emosional. Pedagang menyadari bahwa lokasi baru memberikan fasilitas yang lebih layak, lingkungan berdagang yang lebih bersih dan aman, serta peluang usaha yang tidak kalah kompetitif dibandingkan lokasi lama. Selain itu, pemerintah menjamin bahwa mereka tidak akan kehilangan penghasilan secara drastis, bahkan pedagang justru mengalami peningkatan pendapatan setelah relokasi. Lebih jauh, keberhasilan komunikasi antara pemerintah dan pedagang menciptakan rasa kepercayaan, di mana para pedagang merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan dan meminimalisir potensi konflik.

Secara keseluruhan, relokasi PKL oleh Pemko Padang Panjang merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif dengan mengedepankan dialog, kepentingan bersama, dan keadilan ruang. Proses ini juga mencerminkan bahwa ruang publik bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga medan interaksi sosial yang harus dikelola secara inklusif. Dalam kerangka pemikiran Hannah Arendt, keberhasilan ini menunjukkan adanya ruang publik yang hidup, tempat warga dan pemerintah dapat berdialog dan saling mengafirmasi peran masing-masing. Penataan ruang bukan sekadar penertiban, melainkan proses sosial-politik yang membuka peluang bagi partisipasi warga dan perwujudan keadilan spasial.

B. Saran

Kepada Pemko Padang Panjang, disarankan untuk terus mengedepankan pendekatan partisipatif dalam setiap kebijakan penataan ruang publik, terutama yang

berkaitan dengan relokasi PKL. Aspirasi dan kebutuhan pedagang harus terus didengarkan dan diakomodasi secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada masyarakat. Selain itu, evaluasi secara berkala setelah relokasi sangat penting dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas penataan ruang publik tersebut.

Kemudian kebijakan relokasi PKL yang telah berhasil diterapkan di Kota Padang Panjang dapat menjadi contoh inspiratif bagi pemerintah daerah lainnya. Pendekatan kolaboratif dan non-represif yang dilakukan Pemko Padang Panjang menunjukkan bahwa penataan ruang publik dapat berhasil tanpa menimbulkan konflik, selama kebijakan disusun dengan mempertimbangkan aspirasi warga, menyediakan alternatif yang layak, dan dijalankan secara transparan. Semoga praktik baik ini dapat direplikasi dengan penyesuaian konteks oleh daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan kajian lebih luas tentang relokasi pedagang, tata kelola ruang publik, dan dampak sosial-ekonomi pasca kebijakan. Penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi studi, menggunakan pendekatan komparatif, atau menelaah dampak jangka panjang terhadap ekonomi pedagang dan kualitas ruang kota.